

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sangat penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi, karena K3 merupakan bagian integral dari perencanaan dan pengendalian proyek [1]. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dijelaskan bahwa SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan risiko kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Upaya ini mencakup pemantauan, pengukuran, pengendalian risiko, serta tindakan pencegahan untuk menghindari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan oleh organisasi.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kini tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan penting dalam setiap jenis pekerjaan. Implementasi K3 bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja, baik secara fisik maupun mental, serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja [2]. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui regulasi dan kebijakan daerah juga terus mendorong penerapan SMK3 dalam sektor konstruksi guna menjamin perlindungan kerja yang memadai di tengah dinamika proyek pembangunan.

Salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan pembangunan konstruksi secara masif adalah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur khususnya

Labuan Bajo. Berdasarkan Rencana Strategis BPS Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020–2024, Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah pusat. Penetapan ini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk hotel, resort, serta fasilitas pendukung lainnya yang sebagian besar dilakukan melalui proyek konstruksi skala menengah hingga besar. Tingginya volume proyek ini menjadi indikator meningkatnya risiko kerja, sehingga implementasi SMK3 sangat krusial untuk menjamin keselamatan para pekerja.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua proyek konstruksi di Labuan Bajo menerapkan SMK3 secara optimal. Berdasarkan data Direktori Perusahaan Konstruksi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat sekitar 220 perusahaan konstruksi yang beroperasi di wilayah ini, sebagian besar dalam kategori usaha kecil dan menengah. Perusahaan berskala kecil dan menengah kerap menghadapi kendala dalam menerapkan SMK3, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya pelatihan, serta lemahnya budaya keselamatan kerja [3].

Kepala Disnakertranskop UKM Kabupaten Manggarai Barat, Theresia P. Asmon, menegaskan bahwa keselamatan kerja di proyek konstruksi adalah hal yang wajib dan tidak bisa ditawar. Namun, pada praktiknya, masih ditemukan kontraktor yang hanya memenuhi aspek administratif SMK3 tanpa implementasi nyata di lapangan. Bahkan, terdapat kasus di mana anggaran K3 dalam proyek tidak digunakan dan dikembalikan ke negara karena tidak dimanfaatkan (ANTARA,

2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara kebijakan dan pelaksanaan yang perlu dikaji secara lebih dalam.

Melihat pentingnya penerapan K3 dalam menjamin keselamatan kerja serta masih adanya berbagai kendala di lapangan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat penerapan SMK3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengurutkan faktor-faktor penghambat berdasarkan rata-rata tingkat hambatan dan tingkat kejadian dari masing-masing faktor. Selanjutnya, hasil tersebut akan digambarkan dalam diagram *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk melihat faktor mana yang menjadi perhatian utama. Penelitian ini juga akan menganalisis hubungan antara tingkat hambatan dan tingkat kejadian agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang penghambat penerapan SMK3 di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana urutan faktor penghambat SMK3 berdasarkan tingkat hambatan dan tingkat kejadian di proyek konstruksi?
2. Bagaimana hubungan antara tingkat hambatan dan tingkat kejadian dari faktor-faktor penghambat penerapan SMK3?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara pekerja dan wakil kontraktor terkait faktor penghambat penerapan SMK3 pada proyek konstruksi di Labuan Bajo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui urutan faktor penghambat SMK3 berdasarkan tingkat hambatan dan tingkat kejadian di proyek konstruksi
2. Mengetahui hubungan antara tingkat hambatan dan tingkat kejadian dari faktor-faktor penghambat penerapan SMK3
3. Mengetahui perbedaan persepsi antara pekerja dan wakil kontraktor terkait faktor penghambat penerapan SMK3 pada proyek konstruksi di Labuan Bajo.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan terfokus, maka peneliti menetapkan batasan-batasan masalah berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor penghambat penerapan K3 yang berasal dari internal proyek, yaitu dari manajemen proyek dan sikap atau perilaku pekerja.
2. Penelitian tidak membahas peran pemerintah atau pihak luar lainnya sebagai pengawas proyek.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan konstruksi dalam mengidentifikasi kelemahan penerapan K3 di lapangan, sehingga dapat meningkatkan protokol keselamatan dan pelatihan pekerja.
2. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran manajemen dan pekerja mengenai pentingnya penerapan K3 dalam dunia konstruksi.
3. Mampu menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang K3 dan praktik keselamatan kerja di sektor konstruksif.

